

STRATEGI PERTAHANAN SEMESTA DALAM RANGKA MENGEMBALIKAN MASA KEEMASAN INDONESIA

I Wayan Mudita¹

Abstrak: Konsep pertahanan Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan mengalami pasang surut. Mungkin banyak yang belum paham bahwa Indonesia pada tahun 1960an, yaitu era Presiden Soekarno, merupakan salah satu kekuatan terhebat di dunia di bidang militer. Pada saat itu kekuatan raksasa militer Indonesia, membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang yang disegani. Namun perlahan julukan tersebut memudar dan kini sudah tidak terdengar lagi. Lahan tetapi pasti, sebagian masyarakat sudah tidak lagi menaruh harapan tinggi pada Indonesia. Sudah lama masyarakat merasakan ketidakpuasan tentang pemerintahan di Indonesia. Begitu juga ancaman korupsi di tiap lini pemerintahan dimana-mana. Pejabat-pejabat di Indonesia tidak sedikit yang tersangkut kasus korupsi. Pada akhirnya, sebagai akibat dari ini semua, masyarakat sering mencibir pemerintahan Indonesia, dari berbagai lini baik militer, ekonomi, juga sosial. Dengan kondisi sekarang ini, mungkinkah hal itu terjadi lagi? Sedangkan tidak sedikit masyarakat Indonesia merindukan masa-masa keemasan itu kembali. Oleh karena itu perlu strategi yang baru guna mengembalikan masa keemasan Indonesia kembali, sebagaimana yang tersirat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 20014 tentang TNI perihal Pertahanan Semesta Indonesia.

Kata Kunci: *Sejarah Pertahanan, Pertahanan Semesta, Strategi Pertahanan.*

1. PENDAHULUAN

Percaturan politik tak luput dari pengaruh kekuatan yang bersitegang menguasai dunia. Soekarno dan kabinetnya membangun Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Beliau sangat gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan sangat berpengaruh membangun semangat rakyat walupun hanya bersenjata bambu runcing pada permulaannya.

Pada tahun 1969, Belanda masih bercokol di tanah Irian Barat. Melihat kekuatan Republik Indonesia yang makin hebat, Belanda yang didukung Barat merancang muslihat untuk membentuk negara boneka yang seakan-akan merdeka, namun masih dibawah kendali Belanda. Presiden Soekarno segera mengambil tindakan ekstrim, tujuannya guna merebut kembali Irian Barat. Soekarno segera mengeluarkan maklumat "Trikor" di Yogyakarta, dan isinya adalah :

1. Gagalakan pembentukan negara boneka Irian Barat buatan kolonial Belanda;
2. Kibarkan Sang Saka Merah Putih di seluruh Irian Barat;

3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa.

Berkat kedekatan Indonesia dengan Sovyet, maka Indonesia mendapatkan bantuan besar-besaran kekuatan armada laut dan udara militer termaju di dunia. Saat itu militer Indonesia menjadi yang terkuat di seluruh belahan bumi selatan. Begitu hebat efeknya, sehingga Amerika di bawah pimpinan John F. Kennedy memaksa Belanda untuk segera keluar dari Papua, dan menyatakan dalam forum PBB bahwa peralihan kekuasaan di Papua, dari Belanda ke Indonesia adalah sesuatu yang bisa diterima.

Sementara itu, pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua (PD II) Presiden Soekarno melihat perpolitikan dunia terbagi menjadi 2 blok. Dua kekuatan inti muncul sebagai pemenang perang PD II, yaitu Amerika dan Uni Sovyet (Rusia sekarang) yang pada akhirnya melahirkan istilah populer Blok Barat dan Blok Timur. Negara-negara yang termasuk ke dalam Blok Barat yaitu Amerika beserta sekutunya yang terdiri dari 12 negara Eropa Barat. Sedangkan negara yang termasuk kedalam Blok Timur adalah Rusia bersama negara-negara Eropa Timur.

¹ Penulis: I Wayan Mudita. Lahir 8 Mei 1941. Lulus insinyur di ITS th 1968. Kerja di Swasta dari 1969 s/d 1995. Wira Swasta dari 1995 hingga kini

Dengan adanya dua kubu ini, Blok Barat dan Blok Timur, tidak serta merta membuat Presiden Soekarno memihak pada salah satu pihak. Beliau lebih memilih jalan politik bebas-aktif, dengan merangkul negara-negara non blok agar bersatu. Hal ini ditunjukkan dengan diadakannya konferensi Asia-Afrika dan selanjutnya mengadakan GANEFO (*Games of New Emerging Force*). Dalam hal ini konsep pertahanan yang dicanangkan Bung Karno sudah sempurna, akan tetapi berdasarkan catatan sejarah yang ada pergolakan serta pertentangan di dalam negeri terus memuncak, begitu pula pergolakan semakin memuncak ketika hadirnya PKI (Partai Komunis Indonesia) di negara ini.

Disinilah awal mulai melemahnya konsep pertahanan Indonesia, karena begitu banyak polemik pada negara yang masih seumur jagung ini, dan yang paling mendasar terhitung sejak berakhirnya zaman Orde Baru, meninggalkan jejak korupsi merajalela dimana-mana, perekonomian Indonesia belum digarap dengan baik, serta UUD 1945 telah mengalami banyak sekali perubahan, terhitung mulai tahun 1949 hingga tahun 2002.

Akibat dari itu semua, akhirnya memberikan dampak yaitu masyarakat Indonesia tidak percaya dan atusias kepada pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan, disetiap pergantian pemerintahan, tidak sedikit pejabat-pejabat negara ini yang tersangkut kasus korupsi, anggaran pertahanan dipangkas, dan sebagainya. Namun meskipun demikian, masih ada beberapa masyarakat Indonesia yang berharap negara ini kembali stabil baik segi ekonomi, sosial dan terutama pertahanan negara. Atas dasar inilah, maka dibutuhkan sebuah strategi pertahanan yang baru untuk mengembalikan masa-masa ketika Indonesia dikenal sebagai Macan Asia, sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

2. STRATEGI PERTAHANAN SEMESTA INDONESIA

Hakekat Pertahanan Negara yaitu segala upaya pertahanan Negara yang bersifat semesta didasarkan atas hak dan

kewajiban sebagai warga Negara Indonesia. Tujuannya adalah menegakkan kedaulatan Negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman. Gerakan Pertahanan Negara dilaksanakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal Negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman.

Sishanta adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total untuk menegakkan kedaulatan negara dalam mempertahankan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari setiap ancaman. Pokok-pokok pertahanan semesta meliputi:

1. Peran warga Negara dalam pertahanan;
2. TNI sebagai komponen utama pertahanan menghadapi ancaman militer;
3. POLRI sebagai komponen utama pertahanan menghadapi ancaman tindak pidana;
4. Ekonomi dan pelaku ekonomi menghadapi ancaman moneter dan keuangan;
5. Pendidik menghadapi ancaman kebodohan bangsa;
6. Dokter dan paramedis menghadapi ancaman wabah penyakit dan virus;
7. Budayawan menghasdapi ancaman penetrasi budaya asing.²

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Sistem Pertahanan Semesta tidak hanya terkait di bidang kemiliteran, akan tetapi mencakup semua bidang. Bidang-bidang yang juga seharusnya menjadi pusat perhatian adalah bidang pemerintahan dan bidang pendidikan yaitu pendidikan anti korupsi dan cinta tanah air.

2.1 Strategi Pertahanan Semesta di Pemerintahan

1. Kembali kepada UUD 1945 asli;
2. Buat DPR gotong royong yang terdiri dari partai-partai (70%) +TNI (30%),

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

serta MPR gotong royong yang terdiri dari DPR+DPD+ TNI (30%), serta pemerintahan gotong royong;

3. Calon anggota dewan, anggota utusan daerah, Kepala daerah/kota/Gubernur, Kepala Lembaga Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif diajukan oleh partai dan dipilih anggota dewan/utusan daerah yang bersangkutan;
4. Kalau ada anggota eksekutif yang korupsi atau melanggar hukum maka harus diadili dengan seberat-beratnya serta dimakzulkan oleh DPR;
5. Kalau ada konflik vertikal atau horizontal, maka presiden jadi wasit tapi harus dalam koridor hukum;
6. Semua calon Pejabat Pemerintah untuk segala jabatan harus bukan mantan koruptor atau kriminal dan diuji dengan *online* computer yang berisi 10000 pertanyaan, yang bisa keluar acak seperti yang pernah dilakukan di Bali untuk tes PNS. Kecuali calon ketua MPR beserta wakilnya serta presiden beserta wakilnya tidak dites dengan *online* computer;
7. BPK harus menyusun perencanaan, pelaksanaan, serta pemeriksaan keuangan yang transparan dan akuntabel yang akan di-*online* kan dan dapat diakses masyarakat termasuk *budget*, pagu harga, *expenditure* serta *follow-up*.

2.2 Strategi Pertahanan Semesta di Pendidikan Anti-Korupsi

Secara garis besar, pada prinsipnya korupsi dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Budaya korupsi di Indonesia tumbuh dan berkembang melalui 3 (tiga) fase zaman, yaitu:

a. Zaman Kerajaan Kuno

Literatur sejarah masyarakat Indonesia, terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno, menggambarkan bagaimana Kerajaan Singosari yang memelihara perang antar saudara bahkan hingga tujuh turunan saling membalas dendam berebut kekuasaan. Lalu, kerajaan Demak yang memperlihatkan persaingan antara Joko

Tingkir dengan Haryo Penangsang, ada juga Kerajaan Banten yang memicu Sultan Haji merebut tahta dan kekuasaan dengan ayahnya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtoyoso³. Hal menarik lainnya pada fase zaman kerajaan ini adalah, mulai terbangunnya watak oportunistik bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah posisi orang suruhan dalam kerajaan, atau yang lebih dikenal dengan "abdi dalem". Abdi dalem dalam sisi kekuasaan zaman ini, cenderung selalu bersikap manis untuk menarik simpati raja atau sultan. Hal tersebut pula yang menjadi embrio lahirnya kalangan oportunistik yang pada akhirnya juga memiliki potensi jiwa yang korup yang begitu besar dalam tatanan pemerintahan kita di kemudian hari.

b. Zaman Penjajahan

Pada zaman penjajahan, praktek korupsi telah mulai masuk dan meluas ke dalam sistem budaya sosial-politik bangsa kita. Budaya korupsi telah dibangun oleh para penjajah kolonial (terutama oleh Belanda) selama 350 tahun. Budaya korupsi ini berkembang di kalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik oleh penjajah, untuk menjalankan daerah administratif tertentu, semisal demang (lurah), tumenggung (setingkat kabupaten atau provinsi), dan pejabat-pejabat lainnya yang notabene merupakan orang-orang suruhan penjajah Belanda untuk menjaga dan mengawasi daerah territorial tertentu. Mereka yang diangkat dan dipekerjakan oleh Belanda untuk memanen upeti atau pajak dari rakyat, digunakan oleh penjajah Belanda untuk memperkaya diri dengan menghisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia. Secara eksplisit, sesungguhnya budaya penjajah yang mempraktekkan hegemoni dan dominasi ini, menjadikan orang Indonesia juga tak segan menindas bangsanya sendiri lewat perilaku dan praktek korupsinya.

c. Zaman Modern

³ Amien Rahayu SS, Jejak Sejarah Korupsi Indonesia-Analisis Informasi LIPI

Fase perkembangan praktek korupsi di zaman modern seperti sekarang ini sebenarnya dimulai saat lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Akan tetapi budaya yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial, tidak serta merta lenyap begitu saja. salah satu warisan yang tertinggal adalah budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal tersebut tercermin dari perilaku pejabat-pejabat pemerintahan yang bahkan telah dimulai di era Orde Lama Soekarno, yang akhirnya semakin berkembang dan tumbuh subur di pemerintahan Orde Baru Soeharto hingga saat ini. Indonesia tak ayal pernah menduduki peringkat 5 (besar) negara yang pejabatnya paling korup, bahkan hingga saat ini. Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif untuk menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan perundang-undangan. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya kitab undang-undang hukum pidana 1 Januari 1918. KUHP sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam Staatblad 1915 nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915.⁴

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bangsa ini telah menyadari betapa sulitnya memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Maka dari itu, dibutuhkan sistem baru dalam pemberantasan korupsi yaitu melalui penanaman nilai-nilai moral terutama pengenalan korupsi perlu dilakukan sejak dini. Pendidikan anti korupsi dapat dimulai dengan membuat kurikulum anti korupsi yang disusun oleh KPK dan Kementerian Pendidikan yang garis besarnya sebagai berikut:

1. Batasan apa yang dikategorikan sebagai korupsi;
2. Akibat yang ditimbulkan oleh korupsi bagi negara dan pelaku;

3. Hal-hal yang mendorong orang korupsi;
4. Sejarah korupsi;
5. Daftar banyaknya koruptor yang telah diadili disemua bagian atau kelompok misalnya di DPR, kepala daerah, dan lainnya.

2.3 Strategi Pertahanan Semesta di Pendidikan Cinta Tanah Air

Pendidikan cinta tanah air disusun oleh Kementerian Pendidikan yang garis besar materinya sebagai berikut:

1. Pelajaran dasar cinta tanah air
2. Ringkasan perjuangan kemerdekaan dari tahun 1908 hingga 1945.
3. Pemberontakan yang terjadi setelah 1945
4. Pengembalian Irian Barat
5. Pemberontakan G30S/PKI

Materi-materi tersebut harus dibukukan dan diajarkan semua mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi serta diujikan dan nilainya ditulis dalam ijazah atau lampiran ijazah.

3. PENUTUP

Pertahanan Indonesia saat ini sudah mulai rapuh, tidak seperti saat Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti konstitusi Negara Indonesia yang berulang kali mengalami perubahan (amandemen) dan pejabat-pejabat Indonesia yang mempunyai bibit-bibit menjadi koruptor. Oleh karena itu guna membangun kembali pertahanan Indonesia menjadi "Macan Asia" diperlukan beberapa pembaharuan dari dalam seperti sistem pemerintahan Indonesia, Pendidikan Anti Korupsi yang harus ditanamkan sejak dini dan dimasukkan kedalam kurikulum yang nantinya kelak akan menjadi acuan pembelajaran sekolah di Indonesia.

Selain itu pendidikan cinta tanah air, jangan hanya sebatas sampai Sekolah Dasar, Perguruan Tinggi baik Negeri ataupun Swasta harus mulai mempertimbangkan setiap lulusannya mempunyai jiwa cinta tanah air, dengan dimasukkannya ujian cinta tanah air dalam ujian akhir guna dilampirkan pada ijazah. Hal ini semua dilakukan karena pertahanan suatu negara bukan hanya tergantung pada kekuatan militernya, tetapi juga

⁴ <http://lafran-pane.blogspot.co.id/2012/10/sejarah-korupsi-di-indonesia.html>

kekuatan dan pertahanan non-militernya pun menjadi salah satu faktor yang menentukan.

Semua ini sejalan dengan wacana sistem pertahanan semesta, dimana sistem pertahanan ini melibatkan seluruh warga Negara untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Wilayah dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total untuk menegakkan kedaulatan Negara mempertahankan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari setiap ancaman. Ancaman yang datang bisa dari eksternal maupun internal.

DAFTAR PUSTAKA

Amien Rahayu SS, Jejak Sejarah Korupsi Indonesia- Analisis Informasi LIPI.

Bakrie, Connie Rahakundini. 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Jatuhnya Orde Baru: Sejarah SMA/MA XII-IPA.
<http://books.google.com/books?isbn=9797596346>

Penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Pane, Lafran. 2012. Sejarah Korupsi di Indonesia. <http://lafran-pane.blogspot.co.id/2012/10/sejarah-korupsi-di-indonesia.html>. (Diakses pada 20 September 2016)

Umbara, Raditya Panji. 2016. *Panduan Resmi Test CPNS 2016*. Bintang Waluyo. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.